BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka merupakan kumpulan sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Tinjauan pustaka terkait karya berisi teori-teori pendukung penelitian, sebagai berikut :

1. Teori Administrasi Pembangunan

a. Pengertian Administrasi Pembangunan

Menurut Tjokroamidjojo (Setiawan, 2019) mengemukakan bahwa administrasi pembangunan merupakan proses pengelolaan sumber daya secara dinamis dan inovatif untuk mendorong perubahan sosial dan ekonomi masyarakat. Sementara itu, menurut Krisdati (Anggara & Sumantri, 2016) administrasi pembangunan merupakan bagian dari administrasi negara yang mendukung perencanaan, pembaruan pembangunan. Administrasi pembangunan mencakup dua aspek utama yaitu *"the development of administration"*, yang meliputi perbaikan organisasi, pembinaan lembaga, pengelolaan kepegawaian, penataan kerja, dan penyediaan sarana administrasi. Aspek kedua *"the administration of development"* yang mencakup penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan secara efektif, Siagian (Negeri & Tuntungan, 2022).

Administrasi pembangunan menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, dan perlunya koordinasi

antar lembaga pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan secara efektif dan efisien. Administrasi pembangunan bukan hanya sekedar proses administratif, tetapi juga menjadi alat strategis untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Peran aktif pemerintah dan partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam implementasi administrasi pembangunan, Tjokroamidjojo (Sudriamunawar, 2002).

b. Ciri-ciri Administrasi Pembangunan

Menurut Afifuddin (2010), beberapa ciri-ciri administrasi pembangunan, diantaranya :

(1) Ciri pokok pertama administrasi pembangunan adalah adanya orientasi yang kuat terhadap tindakan nyata dan pencapaian tujuan yang jelas. Administrasi pembangunan ditujukan untuk menghasilkan proses pembangunan yang optimal. Administrasi pembangunan mengandung unsur kepeloporan *(degree of pioneering)* dan usaha merintis perubahan *(initiate changes)* yang signifikan.

(2) Ciri pokok kedua dari administrasi pembangunan adalah adanya dorongan untuk terus menyempurnakan sistem administrasi dengan seiring perkembangan di berbagai sektor, seperti ekonomi, sosial, politik, dan lainnya, karena perubahan administrasi akan mempengaruhi sektor-sektor tersebut.

c. Fungsi Administrasi Pembangunan

Menurut Tjokroamidjojo (Sudriamunawar, 2002:32) ruang lingkup fungsi administrasi pembangunan terbagi menjadi dua, diantaranya :

(1) Fungsi dalam menyusun dan menyempurnakan kebijakan administrasi negara *(the administrasi of development*). Fungsi ini berfokus pada upaya meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan agar mampu mendukung pelaksanaan pembangunan secara optimal.

(2) Fungsi dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan secara efisien dan efektif. Fungsi ini berorientasi pada perencanaan untuk tujuan dengan memanfaatkan sumber daya secara maksimal.

Mengacu pada kedua fungsi administrasi pembangunan, mencakup upaya peningkatan kualitas administrasi pemerintahan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan secara optimal, perumusan kebijakan, program pembangunan yang efisien dan efektif melalui perencanaan yang terarah dan pemanfaatan sumber daya secara maksimal.

2. Konsep Pariwisata

a. Pengertian Pariwisata

Prapita (2018) menjelaskan bahwa pariwisata merupakan suatu aktivitas perjalanan sementara dari satu lokasi ke lokasi lainnya, yang tujuannya bukan untuk bekerja, tetapi untuk menikmati berbagai pengalaman wisata yang ditawarkan di daerah yang dikunjungi. Menurut Riani (2021) pariwisata adalah salah satu fenomena yang saat ini populer untuk dikembangkan sebagai sumber devisa negara. Sama halnya, menurut Umagapi & Ambarita (2018) mengatakan bahwa pariwisata merupakan sektor unggulan pembangunan yang

berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan nasional, dan berkontribusi terhadap devisa negara.

Adapun pengertian pariwisata menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 pada Pasal 1 Ayat (3), yaitu :

> ”Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 pada pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah”.

Pariwisata dikenal sebagai salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia karena mampu memenuhi kebutuhan liburan, rekreasi, dan apresiasi terhadap budaya daerah. Pariwisata memberikan kesempatan bagi individu untuk menikmati layanan bersama wisatawan lain dalam kurun waktu tertentu, serta memperoleh pengalaman dari aktivitas sehari-hari, Wahab (Andina & Aliyah, 2021).

Mengacu berbagai pendapat para ahli, maka penulis dapat memberikan pengertian pariwisata merupakan suatu aktivitas perjalanan yang bersifat sementara ke tempat lain yang memiliki daya tarik wisata, dengan tujuan rekreasi, hiburan, mencari pengalaman baru, serta menjalin interaksi sosial di lingkungan berbeda.

b. Tujuan Pariwisata

Tujuan pariwisata sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2002 tentang Kepariwisataan, sebagai berikut :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
3. Menghapus kemiskinan.
4. Mengatasi pengangguran.
5. Melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya.
6. Memajukan kebudayaan.

7. Mengangkat citra bangsa.
8. Memupuk rasa cinta tanah air.
9. Memperkokoh jati diri dan kesatuan bangsa.
10 Mempererat persahabatan antar bangsa.

Mengacu Undang-undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pariwisata dipandang sebagai strategi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, serta pengurangan kemiskinan. Pariwisata juga berperan dalam pelestarian alam dan budaya, memperkuat jati diri bangsa, serta menjalin hubungan antarbangsa. Oleh karena itu, pariwisata menjadi bagian penting dari pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor.

c. Manfaat Pariwisata

Pariwisata memberikan berbagai manfaat sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009, diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat bagi ekonomi yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan negara dan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
2. Manfaat bagi sosial yaitu meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat, memperkuat budaya bangsa, meningkatkan sikap toleransi dan saling menghargai antar budaya.
3. Manfaat bagi lingkungan yaitu memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup sekitarnya, serta mendorong pengembangan pariwisata berkelanjutan.
4. Manfaat bagi berbangsa dan bernegara yaitu memperkokoh keutuhan negara, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa.

Pariwisata memiliki peran strategis yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memperkuat nilai sosial, budaya,

lingkungan dan kebangsaan. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata perlu dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab agar manfaatnya dapat terus dinikmati berbagai pihak dan

d. Jenis-jenis Pariwisata

Pariwisata memiliki beragam bentuk yang berkembang sesuai dengan minat wisatawan dan karakteristik daerah. Menurut Fendeli (Andina & Aliyah, 2021) terdapat jenis-jenis pariwisata yang terbagi menjadi 2 kategori, diantaranya :

(1) Daya Tarik Alam

Daya tarik alam merupakan jenis pariwisata yang dimanfaatkan keindahan lingkungan alami sebagai daya tarik utamanya. Kegiatan wisata ini dilakukan dengan mengunjungi lokasi-lokasi yang memiliki keunikan panorama alam, seperti pantai, pegunungan, air terjun, kawasan hutan, dan objek wisata alam lainnya.

(2) Daya Tarik Budaya

Daya tarik budaya merupakan jenis pariwisata yang berfokus pada kekhasan dan keunikan budaya suatu daerah. Jenis wisata ini mencakup kunjungan ke lokasi-lokasi yang memiliki nilai budaya, yang berdasarkan pada minat khusus, seperti seni pertunjukan maupun kegiatan budaya lainnya.

Jenis-jenis pariwisata dapat memberikan pengalaman yang unik dan berbeda-beda sesuai dengan minat wisatawan. Keberagaman jenis pariwisata memungkinkan setiap wisatawan memilih destinasi dan aktivitas yang paling sesuai dengan ketertarikan masing-masing, baik

terhadap pesona alam maupun budaya daerah. Selain menjadi daya tarik utama, keberagaman jenis pariwisata juga memberikan peluang bagi daerah untuk mengoptimalkan potensi lokal.

3. Konsep Pengembangan Desa Wisata

a. Pengertian Pengembangan Desa Wisata

Menurut Inskeep (Dewi,2013), desa wisata merupakan bentuk pariwisata, yang melibatkan wisatawan tinggal di desa untuk mempelajari kehidupan dan lingkungan lokal. Sama halnya, menurut Prapita (2018), desa wisata adalah perpaduan antara atraksi akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan oleh masyarakat setempat. Desa wisata merupakan desa yang memiliki daya tarik khas dari alam dan budaya lokal, yang dikelola secara terencana dengan fasilitas pendukung wisata untuk menarik kunjungan wisatawan, Muliawan (Atmoko, 2021).

Menurut Noor & Pratiwi (2016), pengembangan desa wisata merupakan kolaborasi antara sektor publik (pemerintah) dan sektor swasta (dunia usaha). Hal ini diperkuat oleh Chaerunissa, (2020), yang menjelaskan bahwa pengembangan desa wisata dilakukan secara terkoordinasi melalui penyediaan infrastruktur, layanan, dan fasilitas pendukung bagi wisatawan. Pengembangan desa wisata dapat diwujudkan melalui peningkatan infrastruktur dan penyediaan fasilitas rekreasi yang memberikan manfaat bagi wisatawan. Keberhasilan dari pengembangan desa wisata memerlukan strategi yang fleksibel dan menyeluruh, agar mampu merespons berbagai peahan dari faktor

internal maupun eksternal, (Noor & Pratiwi, 2016).

Mengacu pada berbagai pandangan para ahli mengenai pengembangan desa wisata, maka penulis dapat memberikan penjelasan bahwa pengembangan desa wisata merupakan suatu proses yang memerlukan kolaborasi antar sektor publik dan swasta, dengan menetapkan nilai-nilai budaya, sejarah, dan kondisi sosial di daerah wisata.

b. Tujuan Pengembangan Desa Wisata

Menurut Prayudi dan Yuliarmi (2019), pengembangan desa wisata bertujuan mendorong peningkatan ekonomi masyarakat setempat, menjaga kelestarian budaya daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan membangun hubungan sosial dan budaya. Sementara itu, Prapita (2018) menjelaskan bahwa pengembangan desa wisata bertujuan memperkuat peran masyarakat sebagai pelaku utama dalam pembangunan pariwisata, serta mendorong kolaborasi dengan pemangku kepentingan guna meningkatkan kualitas pariwisata di daerah.

Mengacu pada penjelasan di atas, pengembangan desa wisata berperan strategis dalam meningkatkan perekonomian lokal, melestarikan budaya daerah, dan mendorong kesejahteraan masyarakat. Pengembangan desa wisata menjadi sarana penting untuk memperkuat partisipasi aktif masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan, dan membangun kerja sama dengan pemangku kepentingan guna menciptakan kualitas pariwisata berkelanjutan.

c. Langkah-langkah Pengembangan Desa Wisata

Menurut Prapita (2018), terdapat beberapa langkah-langkah pengembangan desa wisata, diantaranya sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi Potensi dengan Pendekatan 3P

Pendekatan 3P merupakan metode untuk menggali potensi dalam pengembangan desa wisata. Ketiga pendekatan ini membantu menilai kesiapan dan keunggulan suatu daerah sebagai tujuan wisata. Adapun penjelasan lebih rinci mengenai pendekatan 3P, sebagai berikut :

a) Posisi. Menurut Prapita (2018), langkah pertama dari pengembangan desa wisata adalah mengenali lokasi desa dari segi geografis, seperti letak yang strategis, kemudahan akses transportasi, serta konektivitas wilayah yang berpengaruh terhadap daya Tarik.
b) Potensi. Menurut Prapita (2018) potensi desa wisata meliputi sumber daya alam seperti keindahan alNonam dan lingkungan, serta sumber daya manusia yang mencakup antusiasme masyarakat dalam mendukung pariwisata.
c) Prestasi. Menurut Prapita (2018), dalam pengembangan desa wisata, prestasi menunjukkan keberhasilan desa dalam berbagai bidang dan menjadikan bukti kesiapan, serta daya saing desa untuk berkembang sebagai daerah wisata yang berkualitas.

2. Membentuk Lembaga Pengelola di Tingkat Desa

Menurut Prapita (2018), beberapa peran strategis dari lembaga pengelola desa wisata, diantaranya :

a) Kelompok Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata)

Menurut Prapita (2018), Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) merupakan Lembaga yang dibentuk oleh pemerintah desa untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pariwisata. Kelompok Sadar Wisata memiliki tugas utama menyosialisasikan nilai-nilai "Sapta Pesona" seperti menciptakan lingkungan yang aman, tertib, bersih, dan ramah bagi para wisatawan.

b) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Prapita (2018) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga desa yang dibentuk oleh pemerintah desa dan dikelola oleh masyarakat. Pembentukan BUMDes bertujuan untuk memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki desa. BUMDes menjadi penggerak penyediaan layanan pendukung seperti pengelolaan *homestay,* jasa pemandu wisata, pengelola objek wisata, dan hingga pemasaran produk lokal.

c) Lembaga Pengelola Desa Wisata

Menurut Prapita (2018) lembaga Pengelola Desa Wisata merupakan organisasi yang dibentuk oleh tokoh masyarakat dan berperan dalam mengelola kegiatan pariwisata secara profesional. Lembaga ini bertanggung jawab atas pengelolaan fasilitas, pelayanan terhadap wisatawan, serta pelaksanaan promosi dan pemasaran destinasi wisata.

Prapita (2018) menjelaskan bahwa terdapat struktur organisasi terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, serta beberapa seksi-seksi kebutuhan seperti, pemandu *(guide)*, *Homestay*, keamanan, promosi,

dan lingkungan. Berikut adalah beberapa penjelasan rinci mengenai seksi-seksi dalam struktur organisasi lembaga “Pengelola Desa Wisata” sebagaimana dijelaskan oleh Prapita (2018), antara lain :

(1) Seksi Pemandu. Menurut Prapita (2018), pemandu wisata adalah individu yang memiliki peran penting dalam mendampingi wisatawan selama kunjungan. Tugas utama seksi ini yaitu memberikan informasi, arahan, serta saran seputar kegiatan wisata.

(2) Seksi *Homestay.* Menurut Prapita *(2018) Homestay* merupakan bentuk akomodasi yang disediakan oleh penduduk lokal untuk wisatawan, berupa penginapan yang menyewakan suatu tempat maupun bangunan yang dapat disewa harian atau mingguan.

(3) Seksi Keamanan. Menurut Prapita (2018) seksi keamanan merupakan aspek yang penting dalam mendukung sektor pariwisata. Hal ini terbukti dari banyaknya wisatawan merasa senang dan aman saat berlibur di daerah yang aman. Sementara itu, apabila suatu daerah dikenal rawan atau tidak aman, maka minat wisatawan untuk berkunjung akan kurang. Oleh karena itu, aspek keamanan harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan destinasi wisata agar dapat menarik lebih banyak kunjungan wisatawan.

(4) Seksi Promosi. Menurut Prapita (2018), seksi promosi merupakan upaya sangat penting untuk mengenalkan produk atau layanan kepada masyarakat luas. Dalam pariwisata, promosi bertujuan untuk memberi informasi kepada calon wisatawan tentang daya tarik suatu destinasi agar wisatawan tertarik untuk berkunjung.

d. Pentingnya Pengembangan Desa Wisata

Menurut Yoeti (2008), menyatakan bahwa desa wisata memiliki potensi besar untuk memberikan dampak ekonomi dan sosial yang signifikan terhadap masyarakat di sekitar wilayah tersebut. Berikut ini adalah beberapa alasan pentingnya pengembangan Desa Wisata, antara lain:

(1) Dampak Ekonomi

Menurut Yoeti (2008:77), adanya pengembangan desa wisata membantu mendorong terciptanya lapangan pekerjaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lapangan kerja ini muncul melalui pembangunan berbagai infrastruktur seperti jalan, objek wisata, restoran, hotel, dan lainnya. Selain itu, dengan bertambahnya jumlah wisatawan akan meningkatkan permintaan terhadap produk dan jasa lokal, yang pada akhirnya memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.

(2) Nilai non-ekonomis

Yoeti (2008:77) menekankan bahwa motivasi utama sebagian dari wisatawan bukan hanya untuk bersantai, tetapi juga memperoleh pengalaman emosional, seperti mengagumi keindahan alam danNo mengenal kebudayaan lokal yang khas. Hal ini memperlihatkan pentingnya melestarikan warisan budaya seperti adat istiadat, kesenian daerah, dan bangunan bersejarah, yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan.

(3) Pengaruh Sosial dan Budaya

Yoeti (2008:78) menjelaskan bahwa pengembangan pariwisata dapat menciptakan ruang interaksi antara wisatawan dan masyarakat lokal. Proses ini membuka peluang untuk saling memahami, menghilangkan prasangka, serta memperluas wawasan penduduk tentang budaya luar. Oleh karena itu, pariwisata berperan dalam mendukung pembentukan masyarakat yang terbuka dan toleran.

4. Kebijakan dan Regulasi Pemerintah tentang Pariwisata

Pengembangan pariwisata di Indonesia sangat bergantung pada kebijakan dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Salah satu dasar hukum penting yang menjadi alasan utama adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Undang-undang ini mengatur berbagai prinsip dasar kepariwisataan nasional, termasuk perencanaan, pengelolaan, pengawasan, serta pengembangan destinasi wisata di seluruh wilayah Indonesia, baik kota maupun di desa.

Namun, seiring berjalannya waktu dan perubahan kebutuhan, pembaruan regulasi diperlukan agar tetap relevan dengan kondisi terkini. Oleh karena itu, pada tahun 2025, Komisi VII DPR RI tengah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Revisi ini bertujuan untuk memperjelas pembagian tugas dan kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam pengelolaan sektor pariwisata.

Dalam pengembangan desa wisata, Pemerintah melalui

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah menetapkan Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa. Penggunaan dana desa dikelola melalui pendekatan partisipatif, dengan melibatkan peran aktif masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan desa, dan juga termasuk pengembangan desa wisata sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal.

Selain itu, pengembangan desa wisata juga merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), Nomor 39 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Potensi Ekonomi Desa. Regulasi ini memberikan arah dan pedoman kepada pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi ekonomi desa, termasuk sektor pariwisata berbasis lokal. Permendagri ini menekankan pentingnya pendekatan partisipatif dan berbasis potensi lokal, serta mendorong pemanfaatan sumber daya yang dimiliki desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam desa wisata, peraturan ini mendorong integrasi antara potensi alam, budaya, dan sosial yang ada di desa untuk dijadikan daya tarik wisata, serta mengembangkan kelembagaan lokal seperti BUMDes dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).

5. Model Pengembangan Pariwisata Desa Lembanna, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.

Desa Lembanna yang terletak di Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata berkelanjutan. Keindahan alam dan budaya yang dimiliki desa ini menjadi daya tarik utama dalam meningkatkan sektor pariwisata. Dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat lokal, maupun pelaku usaha lainnya, menjadi faktor penting dalam mewujudkan pengelolaan wisata yang optimal.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam pengembangan Desa Wisata Lembanna adalah Model CIPP. Model CIPP yang dikembangkan oleh Stufflebeam pada tahun 1971 (Simamora & Rangkuti, 2024). Model CIPP ini terbentuk dari *Context* (konteks), *Input* (masukan), *Process* (proses), dan *Product* (hasil). Menurut Rama et al. (2023) Model CIPP merupakan pendekatan yang digunakan untuk menilai suatu program dengan memperhatikan empat komponen utama, yaitu konteks, input, proses, serta hasil atau produk yang dihasilkan.

Menurut Jamaluddin et al. (2022), adapun uraian penjelasan Model CIPP (*context*, *input*, *process*, dan *product*), sebagai berikut :

a. Konteks sebagai penentu kegiatan melalui pengumpulan informasi untuk menentukan tujuan dan mendefinisikan lingkungan yang relevan, kemudian mengidentifikasi kekurangan, kekuatan, permasalahan, serta memberikan solusinya.
b. Input adalah menentukan cara tujuan program dicapai, mencakup: a) sumber daya manusia, b) sarana dan peralatan pendukung, c) prosedur yang diperlukan.
c. Proses adalah untuk memeriksa pelaksanaan suatu program sehingga mampu memberikan feedback terhadap pemangku kebijakan tentang ketercapaian aktivitas program yang berjalan sesuai rencana, jadwal, penggunaan sumber-sumber secara efisien sesuai yang dibutuhkan.

d. Produk/*output* adalah untuk mengukur, menafsirkan dan menetapkan pencapaian. Hal ini bertujuan sebagai upaya untuk membantu memberikan keputusan tentang.

Selain itu, Model CIPP membantu peneliti untuk mengetahui secara menyeluruh berbagai program atau rencana dalam pengembangan pariwisata yang telah atau sedang dilaksanakan. Pendekatan ini juga mempermudah penyusunan kerangka berpikir yang sistematis untuk mengkaji aspek-aspek penting dalam pelaksanaan pengembangan desa wisata Lembanna.

Adapun, penjelasan lebih rinci terkait penerapan Model CIPP *(Context, Input, Process, Product*), dalam pengembangan Desa Wisata Lembanna, sebagai berikut :

(a) *Context* (Konteks)

Context (Konteks) merupakan komponen pertama yang digunakan untuk mengidentifikasi latar belakang dan masalah yang mendasari dilaksanakannya suatu program. Konteks bertujuan untuk memahami latar belakang, kebutuhan dan permasalahan yang menjadi dasar pelaksanaan program. Dalam pengembangan Desa Wisata Lembanna, konteks ini mencakup kondisi alam, sosial, dan potensi desa yang mendukung arah pengembangan wisata. Desa Wisata Lembanna memiliki potensi alam dan budaya lokal.

Namun, pengembangan desa wisata masih menghadapi beberapa kendala, seperti akses jalan yang belum baik, kurangnya fasilitas yang tersedia, belum adanya pusat promosi, dan lainnya. Oleh karena itu, dalam tahap analisis konteks ini, perlu dilakukan pemetaan menyeluruh mengenai potensi dan tantangan yang ada agar pengembangan

pariwisata dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

(b) *Input*

Input adalah segala bentuk sumber daya dan rencana yang disiapkan untuk mendukung pelaksanaan program. Dalam pengembangan desa wisata, Input sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, anggaran, kebijakan, sarana dan prasarana, serta dukungan dari berbagai pihak. Keterlibatan sumber daya manusia menjadi kunci utama dalam keberhasilan pengembangan desa wisata.

Pengembangan Desa Wisata Lembanna juga membutuhkan peningkatan fasilitas dasar penunjang kenyamanan wisatawan, seperti akses jalan yang lebih baik, pusat informasi wisata, tempat parkir, toilet umum, tempat ibadah, dan lainnya. Ketersediaan jaringan internet yang stabil juga menjadi kebutuhan penting di era digital saat ini, dimana wisatawan lebih banyak memanfaatkan teknologi untuk mengakses informasi dan membagikan pengalaman selama berada di area wisata.

Selain itu, pengembangan wisata juga membutuhkan dukungan anggaran dari pemerintah maupun swasta, serta regulasi yang mendukung pengelolaan wisata. Pemerintah daerah berperan penting dalam merumuskan kebijakan, pelestarian lingkungan, tata kelola wisata, dan bantuan bagi UMKM lokal. Di sisi lain, kolaborasi dengan pihak swasta juga dapat memperkuat upaya untuk mewujudkan pengembangan wisata yang berkelanjutan.

(c) *Process*

Process merupakan komponen yang berfokus pada pelaksanaan kegiatan program di lapangan. Dalam pengembangan Desa Wisata

Lembanna, proses mencakup peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan pengelolaan usaha wisata, pelayanan wisatawan, pengelolaan *homestay,* dan pengembangan ekonomi kreatif.

Selain itu, penguatan kelembagaan lokal seperti Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dilakukan untuk mengkoordinasikan kegiatan wisata, menjaga fasilitas, dan menjalin kemitraan dengan pihak eksternal. Peran strategis Pokdarwis sangat penting dalam memastikan kelangsungan kegiatan wisata secara terorganisir dan berkelanjutan. Fasilitas penunjang wisata seperti akses jalan, penginapan, sarana dan lainnya perlu ditingkatkan guna menciptakan kenyamanan bagi wisatawan. Pelestarian budaya lokal juga diperhatikan melalui pelatihan bagi masyarakat, termasuk pemandu lokal dan pengelola *homestay.*

(d) *Product*

Product merupakan komponen yang berfokus pada hasil akhir dari suatu program atau rencana, baik yang bersifat langsung (*output*) maupun tidak langsung (*outcome* dan *impact*). *Product* ini mengacu pada *outcome* yang diharapkan dari proses pengembangan Desa Wisata Lembanna. *Outcome* ini dapat dilihat dari berbagai aspek, termasuk peningkatan jumlah wisatawan, keberlanjutan lingkungan dan budaya lokal. Salah satu hasil utama dari pengembangan ini adalah terwujudnya Desa Wisata Lembanna sebagai destinasi wisata berkelanjutan.

Oleh karena itu, dengan adanya pengelolaan yang baik, diharapkan

jumlah wisatawan yang datang ke desa ini meningkat secara signifikan, baik dari wisatawan domestik maupun mancanegara. Sementara dari sisi ekonomi, pengembangan desa wisata akan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat setempat. *Homestay* yang dikelola oleh warga akan menjadi sumber pendapatan tambahan, begitu pula dengan usaha kuliner lokal, kerajinan tangan, serta jasa pemandu wisata.

B. Definisi Konsep

Model CIPP *(Context, Input, Process,* dan *Product*) yang dikembangkan oleh Stufflebeam (1971) merupakan kerangka konseptual yang dapat digunakan untuk menganalisis dan mengembangkan berbagai program, termasuk dalam pengembangan desa wisata. Penelitian ini menggunakan Model CIPP sebagai pendekatan sistematis untuk memahami pengembangan Desa Wisata Lembanna.

Berikut adalah susunan konsep dari Model CIPP yang akan menggambarkan penelitian pengembangan Desa Wisata Lembanna, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, diantaranya :

1. *Context* (Konteks)

Aspek konteks mengacu pada kondisi awal yang menjadi dasar perlunya pengembangan Desa Wisata Lembanna. Komponen ini mencakup :

- Kondisi lingkungan, seperti letak geografis, keindahan alam, serta

kekayaan budaya lokal di Desa Lembanna.

- Potensi wisata, baik alam maupun budaya, yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik utama bagi wisatawan.
- Faktor pendukung pengembangan, meliputi aspek sosial dan budaya, yang berperan dalam menentukan sejauh mana kesiapan masyarakat lokal, serta dukungan dari pihak pemerintah dalam mendorong sektor pariwisata.

2. *Input* (Masukan)

Komponen input berfokus pada sumber daya dan perencanaan yang digunakan untuk mengimplementasikan pengembangan desa wisata. Hal-hal yang termasuk dalam aspek ini, diantaranya :

- Sumber daya manusia, seperti kapasitas aparatur desa, kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dan partisipasi masyarakat.
- Anggaran, yang diperoleh melalui alokasi dari pemerintah daerah, dukungan sektor swasta, dan bantuan program lainnya guna mendukung pengembangan wisata.
- Sarana dan prasarana, mencakup fasilitas dasar yang menunjang kenyamanan wisatawan.
- Strategi pengembangan, meliputi pemberdayaan masyarakat, penguatan produk wisata, promosi destinasi, serta kolaborasi dengan berbagai pihak eksternal, seperti pelaku usaha dan media promosi.

3. *Process* (Proses)

Aspek proses mencerminkan pelaksanaan dari berbagai kegiatan

pengembangan yang telah dirancang. Dalam Desa Wisata Lembanna proses ini, mencakup :

- Program, seperti program-program inti yang meliputi pembangunan dan penataan infrastruktur wisata.
- Kegiatan pendukung, meliputi pelatihan bagi masyarakat (*guide* lokal, *homestay),* kegiatan pelestarian budaya, serta pembentukan dan pelatihan kelompok pengelola wisata.

4. *Product* (Hasil)

Komponen *product* menilai hasil akhir dari pelaksanaan program, baik dalam bentuk *output* langsung maupun dampak jangka panjang. Penilaian pada tahap ini meliputi :

- *Output*, seperti jumlah kunjungan wisatawan yang meningkat setiap tahun dan mencerminkan daya tarik desa wisata.
- *Outcome*, berupa perubahan sosial dan ekonomi masyarakat, seperti meningkatnya pendapatan, keterlibatan aktif masyarakat sekitar, dan peningkatan kualitas hidup.
- *Impact*, dampak jangka panjang termasuk pelestarian budaya lokal, perlindungan lingkungan, serta penguatan identitas desa wisata sebagai destinasi wisata unggulan.

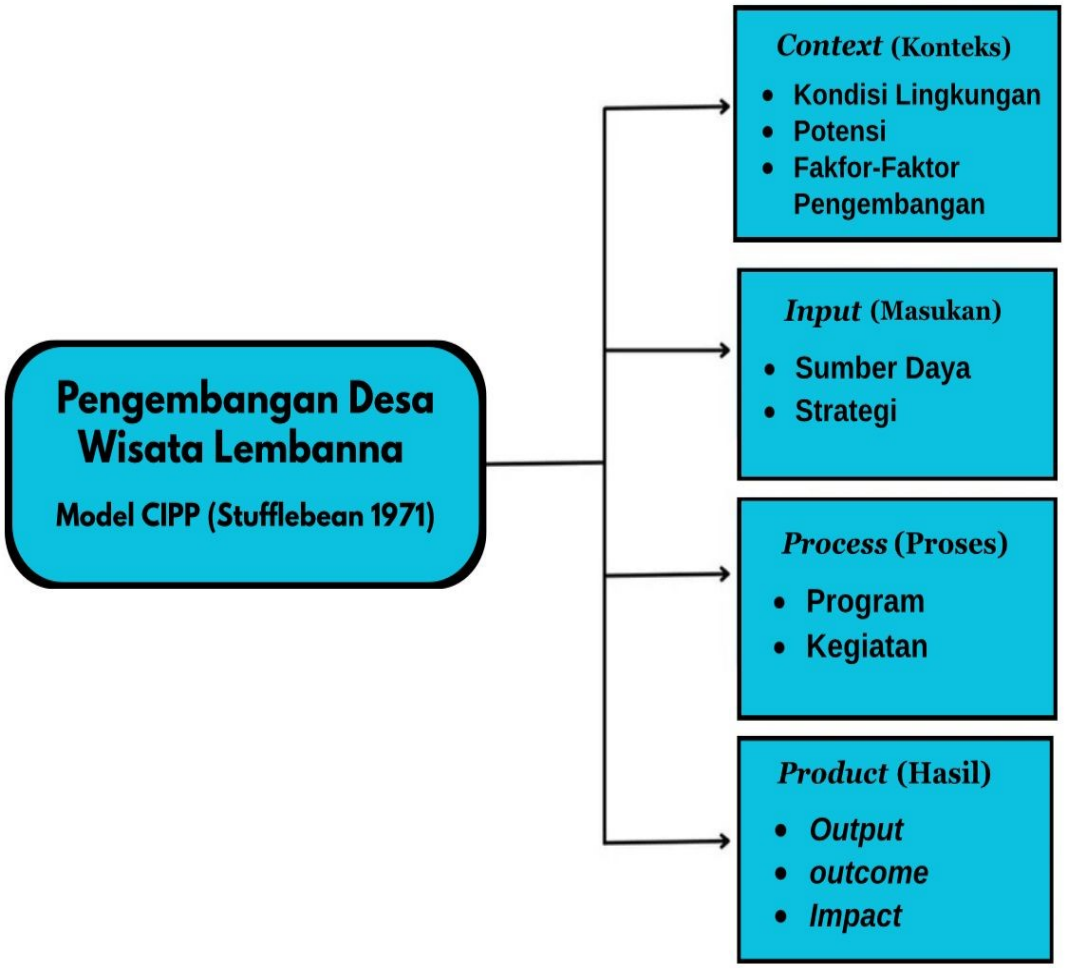
C. Kerangka Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian dan landasan teori yang telah dibahas, maka diperlukan sebuah kerangka penelitian untuk dapat mempermudah penelitian selanjutnya dengan menyusun hubungan

antara variabel yang relevan dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Lembanna, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.

Gambar 4

Kerangka Penelitian



Sumber : Stufflebeam (Simamora & Rangkuti, 2024).